



UPAYA PEMBEBASAN WNI SANDERA KELOMPOK ABU SAYYAF

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Sepuluh orang WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok teroris yang kerap menculik dan menyandera orang asing serta meminta uang tebusan ini, memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme Asia Tenggara lainnya dan ISIS. Pembebasan sandera ABK Indonesia memerlukan kecermatan dan kehati-hatian karena pelakunya merupakan kombinasi antara perompak dan kelompok teroris. Negosiasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dengan Filipina dilakukan untuk pembebasan sandera, termasuk dengan opsi militer.

Pendahuluan

Kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12 berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di sekitar perairan Filipina pada 26 Maret 2016. Penyanderaan dua kapal yang mengangkut 7000 ton batu bara itu terjadi saat dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina Selatan. Kapal tunda Brahma 12 telah dilepaskan dan sudah berada di bawah penanganan Pemerintah Filipina. Sedangkan, kapal Anand dengan 10 ABK WNI masih di bawah kendali kelompok teroris Abu Sayyaf di wilayah Filipina. Pihak penyandera meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14 – 15 miliar dengan tenggat waktu 31 Maret 2016. Namun tenggat waktu tersebut kemudian diperpanjang.

Perompakan disertai penculikan ABK juga menimpa kapal milik Malaysia di Perairan Ligitan, Malaysia pada tanggal 1 April 2016. Dalam peristiwa tersebut 4 ABK Malaysia disandera, sedangkan 3 ABK WNI dan 2 ABK WN Myanmar dilepaskan. ABK WNI yang telah dibebaskan kini telah diselamatkan otoritas Malaysia dan berada di Tawau.

Aksi terorisme maritim Abu Sayyaf, selain bermotif finansial juga berlandaskan perlawanan yang sifatnya politik ideologis, sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati. Pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk membebaskan ke 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf tersebut tanpa tunduk pada tuntutan pembayaran uang tebusan.

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: apujayanti@yahoo.com.



Kelompok Teroris Maritim Abu Sayyaf

Kelompok teroris maritim Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya bermarkas di Mindanao Barat, Filipina Selatan. Kelompok ini mendeklarasikan Mindanao Barat sebagai negara Islam Merdeka dan menentang kesepakatan damai dengan Pemerintah Filipina di tahun 2012. Dengan semakin ketatnya tekanan militer Filipina, kelompok tersebut mulai mengalami kesulitan pendanaan sehingga melakukan aksi penculikan dengan uang tebusan untuk mendanai kegiatan mereka. Penculikan turis asing di resor-resor wisata pantai dan warga sipil lainnya dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal cepat di perairan wilayah Pulau Basilan, Mindanao, Jolo, Tawi-Tawi dan pantai timur Sabah.

Kelompok Abu Sayyaf dan simpatisannya memiliki sejarah panjang dalam aksi terorisme maritim. Diantaranya pengeboman MV Doulos pada 1991 di Zamboanga City, peledakan kapal penumpang Superferry 14 pada 2004 di Teluk Filipina, dan pada 6 Mei 2014 menculik pengusaha peternakan ikan di P. Baik, Sabah. Pada 15 Mei 2015 dua orang juga diculik dari resor di Sandakan, Sabah. Satu orang tewas terpenggal karena negosiasi gagal dan lainnya dibebaskan. Di tahun 2016, selain membajak dan menyandera ABK kapal Brahma 12, Anand 12, dan Massive 6, mereka juga menculik turis Tiongkok dan pekerja Filipina dari resor di Semporna, Sabah. Keduanya dibebaskan pasukan Malaysia dan Filipina.

Terorisme maritim merupakan salah satu representasi dari bentuk peperangan antara negara dengan aksi teror oleh aktor non-negara. Selain untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, adanya basis ideologi memberi kekuatan perlawanan yang lebih militan daripada kelompok penculik yang hanya berbasis ekonomi semata. Mereka juga lebih terlatih dan terorganisasi dalam bertindak dengan aksi-aksi teror. Aksi pendanaan dengan permintaan uang tebusan menandakan dukungan pendanaan bagi kelompok Abu Sayyaf dari simpatisannya semakin minim. Hal ini juga menunjukkan upaya militer Pemerintah Filipina untuk memutus dukungan pendanaan ke kelompok tersebut telah menuai hasil.

Aksi kelompok Abu Sayyaf ini juga meresahkan warga di Pulau Sebatik Kalimantan Utara yang merupakan pulau perbatasan dengan Malaysia. Nelayan di kawasan ini telah terbiasa menghadapi aksi perompakan. Mengantisipasi hal tersebut dan aksi terorisme di perbatasan Indonesia-Malaysia, penjagaan TNI dan polisi di wilayah perairan perbatasan kedua negara sejak tahun 2012 diperketat sehingga aksi perompakan di kawasan ini berkurang.

Aksi kelompok Abu Sayyaf menunjukkan bahwa kelompok teroris mulai melihat laut sebagai peluang mengumpulkan dana bagi perlawanan bersenjata mereka, sehingga persoalan keamanan laut sudah tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan satu negara saja. Lebih lanjut dalam kontak senjata terakhir dengan militer Filipina juga diketahui para militan asing telah masuk berpartisipasi ke dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, perlu penanganan luas dalam melawan kelompok terorisme di laut dengan gelar operasi pemberantasan bersama dengan negara-negara pihak.

Upaya Pembebasan Sandera

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, telah menempatkan isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai prioritas utama dalam agenda kerjanya sebagai bagian dari implementasi sembilan agenda kerja Presiden Joko Widodo (Nawacita). Dalam pelaksanaannya, perlindungan WNI telah dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait. Indonesia mengedepankan soft power dengan negosiasi minim korban jiwa dan biaya. Dalam hal ini, sebagai sesama negara ASEAN, pendekatan politik sejak mula telah dikedepankan Pemerintah Indonesia dengan melakukan koordinasi dengan Filipina dan Malaysia.

1. Jalur Diplomasi

Pemerintah Filipina beranggapan pembajakan ini merupakan upaya pengalihan yang dilakukan simpatisan Abu Sayyaf, karena kelompok tersebut telah terdesak. Sejalan dengan Indonesia, Filipina menolak tegas negosiasi atau membayar tebusan demi membebaskan sandera. Menteri Luar Negeri Retno telah datang ke Filipina. Pemerintah Indonesia

terus memaksimalkan lobi, baik formal maupun informal, agar ada jalan keluar terbaik. Secara resmi kedua negara terus berkoordinasi untuk mencari opsi terbaik bagi pembebasan sandera. Selain dengan Filipina, Menlu Retno juga membuka komunikasi dengan Malaysia. Indonesia meminta kerja sama dengan Malaysia jika sewaktu-waktu diperlukan dan Pemerintah Malaysia menyatakan kesanggupan untuk bekerja sama jika ada perubahan situasi yang memerlukan bantuan dari Indonesia.

Di lain sisi, pendekatan informal juga harus lebih diperkuat. Secara informal Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan kemanusiaan sebagai sesama muslim dengan mengerahkan tokoh-tokoh agama, kekerabatan melalui jalur historis tradisional bekas Kesultanan Sulu dan jalur informal lainnya yang memungkinkan.

Dalam upaya pembebasan sandera terdapat 2 opsi, yaitu opsi militer dan pembayaran tebusan. Perompakan memiliki dimensi geopolitik yang cukup besar, karena tidak hanya menyangkut kepentingan satu negara saja, melainkan banyak negara, baik itu negara pemilik kapal, negara asal ABK, negara pemilik barang, negara tujuan barang, maupun negara tempat aksi perompakan berlangsung. Memastikan kepentingan setiap pihak terjaga adalah salah satu persoalan yang harus bisa dikelola dengan baik dalam rangka manajemen krisis pembajakan.

Kunci pembebasan sandera ada di tangan para negosiator sehingga komunikasi sebaiknya dibuat satu pintu. Keluarga korban, perusahaan pemilik kapal, dan pihak-pihak terkait lainnya dilarang berkomunikasi langsung dengan penyandera. Alasannya, mereka akan mudah diintimidasi dan dipengaruhi sehingga menguatkan posisi penyandera. Seperti dalam kasus MV Sinar Kudus di Somalia tahun 2011, di luar kendali Pemerintah Indonesia, pemilik kapal dan pemilik barang membayar tebusan yang diminta perompak. Hal ini sedikit banyak telah mencederai kehendak Indonesia untuk tidak berkompromi terhadap aksi-aksi yang mengancam WNI.

2. Opsi Pembayaran Tebusan

Menko Polhukum Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah menilai pembayaran tebusan sebagai salah satu

strategi untuk membebaskan sandera. Namun, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan menempuh opsi pembayaran uang tebusan. Rencana pembayaran tebusan merupakan hasil komunikasi langsung antara perusahaan dengan pihak penyandera. Pemerintah akan memantau dengan cermat perkembangannya. PT Patria Maritime Line, pemilik kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, disebut siap membayar tebusan demi kebebasan 10 ABK. Meski demikian, PT United Tractors sebagai induk perusahaan PT Maritime Line menolak memberi jawaban tegas mengenai kebenaran berita tersebut dan siap berkoordinasi dengan pemerintah. Opsi pembayaran uang tebusan didukung oleh kelompok peduli HAM. Pemerintah diminta untuk tidak mempertaruhkan keselamatan atau hak hidup warganya karena berpendapat nilai nyawa lebih besar dari besaran jumlah uang yang dikeluarkan negara.

3. Opsi Pembebasan oleh Militer

Pembayaran uang tebusan belum memberi jaminan bahwa sandera pasti dibebaskan. Opsi ini juga merendahkan harga diri bangsa karena berarti menyerah pada tuntutan terorisme. Opsi ini akan menjadi preseden buruk di mata internasional bahwa negara toleran terhadap aksi terorisme dan memperkuat basis finansial kelompok tersebut. Pembayaran tebusan juga akan menginspirasi aksi terror serupa di masa depan. Dengan pemikiran tersebut Pemerintah harus menyiapkan opsi kedua, yaitu pembebasan sandera dengan kekuatan militer.

Pendekatan keamanan dengan operasi militer untuk pembebasan baru akan dilakukan pada fase berikutnya jika situasi membutuhkan. Militer Indonesia memiliki pengalaman dalam pembebasan warganya dalam kasus penyanderaan di sejumlah negara. Salah satu yang dinilai berhasil adalah pembebasan WNI dari kelompok bersenjata di Bangkok, Thailand tahun 1981. Pendekatan berbeda dilakukan Indonesia ketika membebaskan WNI dari kelompok bersenjata di PNG pada September 2015 dan pembajakan kapal MV Sinar Kudus di Somalia tahun 2011. Namun demikian pola pendekatan pembebasan WNI yang dilakukan pemerintah berbeda-beda

tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Konteks politik pembajakan MV Sinar Kudus di Somalia dengan Brahma 12 di Filipina sangat berbeda. Somalia termasuk kategori negara gagal dengan pemerintahan nasional yang bisa dikatakan tidak berfungsi. Sedangkan Filipina negara berdaulat dan juga merupakan anggota ASEAN.

Indonesia telah menyiapkan pasukan khusus dengan 500 personel dari setiap matra di Tarakan, Kalimantan Utara. Namun Konstitusi Filipina tidak mengizinkan militer asing masuk wilayahnya tanpa ada perjanjian, sehingga pasukan militer Indonesia tidak mendapat izin untuk masuk melakukan operasi penyelamatan. Indonesia hanya diijinkan melakukan asistensi lewat perwira pasukan khusus. Upaya penyelamatan sandera Abu Sayyaf memengaruhi kredibilitas Filipina di dunia internasional, negara tersebut meminta Indonesia mempercayakan persoalan ini kepada pihaknya.

Penutup

Sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama negara ASEAN harus tetap dijunjung tinggi. Upaya penyelamatan sandera merupakan *silent operation*. Namun demikian dalam kasus penyanderaan 10 WNI ABK kapal Brahma ini Kemlu perlu melakukan negosiasi lebih keras dengan Filipina agar militer Indonesia mendapat ijin melakukan operasi penyelamatan secara legal. Hal ini penting mengingat lokasi penyanderaan diduga berada di wilayah selatan atau barat daya Filipina dimana keamanan di wilayah tersebut belum 100 persen dikendalikan oleh Pemerintah Filipina. Kompleksitas kasus ini menyebabkan tidak cukup jika Indonesia hanya mengandalkan rasa percaya kepada Pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia tetap harus memiliki persiapan pembebasan dengan kekuatan militer untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan melalui opsi penyelamatan bersama militer Indonesia dan Filipina. Bagi Indonesia operasi tersebut ditujukan untuk membebaskan sandera WNI, sedangkan bagi Filipina ditujukan untuk penumpasan pertahanan Abu Sayyaf.

Lebih lanjut DPR perlu mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih intensif menggalang kerjasama penanggulangan aksi perompakan dan terorisme maritim di perairan Asia Tenggara diantara negara ASEAN. Baik itu dalam bentuk patroli bersama, pertukaran informasi maupun hal-hal lain sepanjang diperlukan karena wilayah perairan Asia Tenggara rentan terhadap aksi perompakan dan terorisme maritim.

Referensi

- “3 WNI dibebaskan Kelompok Abu Sayyaf”, *Suara Pembaruan*, 5 April 2016.
- Abdul Wahid, “Dari Sutherland ke Abu Sayyaf”, *Media Indonesia*, 2 April 2016.
- “Filipina Tolak Negosiasi Dengan Teroris”, *Suara Pembaruan*, 1 April 2016.
- “Gatot: Soal Sandera, Percayakan Pemerintah”, *Republika*, 3 April 2016.
- “Giliran Kapal Malaysia Dirompak”, *Kompas*, 3 April 2016.
- “Kasus Sandera – pasukan pemukul terus berlatih”, *Kompas*, 6 April 2016.
- “Kontak Senjata – 18 Anggota Militer Filipina Tewas”, *Kompas*, 11 April 2016.
- “Nur Misuari Diharapkan Bantu Bebaskan Sandera”, *Media Indonesia*, 2 April 2016.
- “Pembajakan Brahma 12”, *Kompas*, 5 April 2016.
- “Pemerintah Berpacu Bebaskan Sandera”, *Media Indonesia*, 6 April 2016.
- “Penyanderaan WNI. Wapres: Maksimalkan Lobi Pembebasan”, *Kompas*, 2 April 2016.
- “Perusahaan Kapal Siapkan Tebusan”, *Media Indonesia*, 4 April 2016.
- “Teuku Rezasyah –Gunakan Pendekatan Bawah Tangan”, *Republika*, 11 April 2016.
- “Upaya Pembebasan Belum Jelas”, *Republika*, 11 April 2016.